

SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG DUGAAN KEJAHATAN PERANG
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI TIGRAY ETHIOPIA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
MUHAMMAD IKHDAM KHALID ADELYN
1810112138

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Najmi, S.H., M.H
Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 01/PK-VI/VI/2023

ANALISIS TENTANG DUGAAN KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA YANG TERJADI DI TIGRAY ETHIOPIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

*(Muhammad Ikhdam Khalid Adelyn, 1810112138, Fakultas
Hukum,
Universitas Andalas, 67 Halaman, tahun 2023)*

ABSTRAK

Konflik bersenjata merupakan peristiwa yang sering terjadi di berbagai belahan dunia dan memerlukan perhatian bagi masyarakat dunia. Pada November 2020 terjadi konflik bersenjata di wilayah Tigray Ethiopia antara Pasukan Region Tigray dengan Pasukan Pemerintah Ethiopia. Adanya indikasi kejahatan perang terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan kekerasan seksual terhadap wanita. Penduduk sipil seharusnya dilindungi di dalam perang, hal ini sejalan dengan Aturan Konvensi Jenewa 1949. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini diantaranya bagaimana bentuk bentuk kejahatan perang yang di dalam konflik bersenjata di Tigray Ethiopia dan bagaimana pengaturan hukum serta penyelesaian kasus terhadap dugaan kejahatan perang di Tigray Ethiopia menurut hukum humaniter internasional. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa bentuk kejahatan perang yang terjadi di wilayah Tigray Ethiopia, seperti penyerangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pembunuhan yang disengaja terhadap penduduk sipil, berbagai bentuk penyiksaan terhadap penduduk sipil, dan perlakuan kejahatan seksual terhadap wanita. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum humaniter internasional yang mana penduduk sipil seharusnya dilindungi dan tidak boleh dijadikan objek serangan. Proses penegakkan hukum dalam konflik bersenjata di Tigray Ethiopia dapat ditempuh dengan cara yaitu pertama dengan membentuk pengadilan domestic bagi Negara Ethiopia, kedua dengan menempuh penyelesaian melalui International Criminal Court (ICC), dan yang ketiga dengan melalui Mahkamah Pidana Internasional *Ad Hoc*

Kata Kunci: Kejahatan Perang, Konflik Bersenjata, Geneva Convention 1949, Tigray Ethiopia